

BAB V

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia telah menjadi sorotan masyarakat internasional sekarang ini dan menjadi isu potensial dalam Hubungan Internasional. Hak asasi Manusia ini mulai dikenal dari lahirnya Magna Carta dan seterusnya bertumbuh dengan beberapa pemikiran yang mempengaruhi kemajuan Hak Asasi Manusia di dunia. Perkembangan HAM di Asia Tenggara ini dimulai setelah ASEAN terbentuk setelah itu baru muncul keprihatinan terhadap keadaan masyarakat yang banyak mengalami diskriminasi.

Kawasan Asia Tenggara yang sebagian masih di pimpin oleh sultan atau raja dan sebagian lagi dipimpin oleh dikator. Sebagai kawasan yang ditinggali negara-negara baru merdeka maka tingkat stabilitas politik di Asia Tenggara masih kurang sehingga HAM menjadi prioritas kesekian dibanding dengan kebutuhan lainnya. Tahun 1993 perkembangan HAM di ASEN ditandai dengan gabungannya Asia Tenggara dalam *World Conference on Human Right* di Wina dengan menghasilkan kesepakatan membentuk mekanisme HAM dikawasan regional.

Lambat laun perkembangan HAM di Asia Tenggara berjalan lambat dikarenakan bergabungnya empat negara anggota ASEAN. Setelah krisis tahun 1997, tepatnya di tahun 2004 anggota Negara-negara ASEAN berkumpul membahas pembangunan komunitas ASEAN dan dibahas pula kerjasama HAM

yang merupakan bagian dari pembangunan politik dan keamanan ASEAN. Di

tahun 2008 perkembangan Ham di ASEAN ditandai dengan ACMW sebuah komite ASEAN yang bertujuan melindungi pekerja buruh migrant dari exploitasi, kekerasan dikriminasi dan mempromosikan hak-hak buruh sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh.

Di tahun 2015 ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang tujuannya mempererat kerjasama dan hubungan antara negara anggota sesama ASEAN, ASEAN Charter menjadi salah satu landasan konstitusional pencapaian pembangunan landasan komunitas ASEAN 2015. Setelah ASEAN Charter, AICHR dibentuk dan disepakati AICHR diresmikan pada tahun 2009 di Thailand, tujuan AICHR ini adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks regional, mekanisme HAM di kawasan regional sangat penting karena dianggap bagian dari tolak ukur proses nasional yang sedang dijalankan, selain itu dapat memberi pengetahuan tentang HAM di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangan HAM di Asia Tenggara ini didasari dengan kondisi masing-masing negara anggota ASEAN, kebebasan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan media massa di Indonesia masih di nilai masih dibawah tekanan pihak-pihak yang berkuasa. Contohnya media massa dimonopoli oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kepentingan seperti Metro TV milik Surya Palo, TV One milik Bakrie dimanfaatkan oleh mereka untuk sosialisai terhadap kepentingan-kepentingan mereka melalui pencitraan di media massa. Konflik internal di Myanmar menyebabkan konflik antara etnis seperti terusnya

Konflik di Thailand pada April 2010 antara masa anti pemerintah dan pemerintahan menimbulkan masalah yang berkepanjangan, dengan terbunuhnya warga sipil dan wartawan asing, setelah konflik ini berlangsung pemantauan terhadap media-media di Thailand semakin ketat pemerintah tidak segan dalam menindak media yang memberitakan pemberitaan miring tentang pemerintah setempat. Kurangnya perlindungan terhadap buruh migrant dari Filipina di luar Filipina yang banyak mengalami pelanggaran dinilai karena kurangnya undang-undang yang melindungi mereka, selain itu penyebaran HIV/AIDS meningkat di Filipina dinilai karena kurangnya upaya pemerintah untuk mensosialisasikan KB di Filipina.

Dukungan terhadap HAM ASEAN ini terus mengalir dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara ASEAN mendorong civil society atau masyarakat sipil membentuk perkumpulan guna untuk mempengaruhi terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah agar memperhatikan kondisi Hak Asasi Manusia. Pergerakan NGO ini diawali dengan terbentuknya *The Working Group for an ASEAN Human Right* pada tahun 1995, *The Working Group* ini diprakarsai oleh kelompok akademisi, instansi pemerintah, LSM dibidang HAM yang bertujuan untuk membentuk Komisi Hak Asasi Manusia untuk ASEAN. Tanggapan positif mengenai HAM ini mendorong LSM atau NGO muncul sebagai penggerak dalam memperjuangkan HAM di negara masing-masing pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia awalnya

yang otoriter. Akan tetapi hal itu tidak menyulitkan LSM untuk berkembang lebih besar. HRWG atau *Human Right Working Group* adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang fokus pada kemajuan dan kelangsungan HAM. HRWG merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pembelaan Hak Asasi Manusia yang mendorong negara-negara ASEAN untuk menegakan HAM ASEAN di tubuh Negara-negara ASEAN.

HRWG atau yang di sebut dengan *Indonesia's NGO Coalition for Internasioanal Human Right Advocacy*, pada dasarnya HRWG ini terbentuk dari LSM yang berbeda-beda akan tetapi memiliki pandangan yang sama yaitu terhadap isu Hak Asasi Manusia, dimana mereka mempunyai tujuan sama yaitu untuk menekankan pentingnya penegakkan HAM di Indonesia tentang perlindungan, memenuhi kebutuhan warga negara, menghormati dan mensosialisasikan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Mandat yang diemban oleh HRWG untuk melaukan koordinasi dalam advokasi HAM Internasional terutama melalui mekanisme HAM PBB dan mekanisme HAM pada tingkat regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Untuk memastikan instrument HAM berjalan di Indonesia HRWG mempunyai peranan penting untuk mengawasi dan membagi berbagi informasi mengenai perkembangan HAM di dunia dan Asia Tenggara. HRWG membagi wilayah kerja menjadi tiga tingkatan yaitu, nasional, regional dan Internasional. pada tataran nasional HRWG aktif dalam membangun diskusi dan dialog antara sesama LSM

seperti LSM seperti akademik dan masyarakat umum. Selain diskusi dan

dialog HRWG seringkali mengadakan pelatihan mekanisme HAM terhadap sesama anggota maupun non-anggota HRWG, hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mengenai perkembangan HAM dan sekaligus membagi informasi mengenai sistem HAM terbaru.

Pada tataran regional HRWG mengutamakan kerjasamanya dengan LSM regional Asia Tenggara dan Asia, seperti SEACA, Forum Asia. Kerjasama pada tingkatan ini HRWG bertujuan memperluas jaringan kerjasama dan di harapkan mampu ikut mendorong perkembangan HAM di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. HRWG menilai masih banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami ketidakadilan didalam perlakuan HAM, untuk itu sosialisasi yang dilakuakn HRWG tidak sebatas pada tingkatan nasional akan tetapi sudah merambah pada tingkatan regional.

Pada tataran Internasional HRWG juga banyak melakukan kerjasama dengan *Human Right Watch*, *Diplomacy Training Program*, PBB, IPHRC. Salah satu bentuk kiprrah HRWG pada tataran internasional bekerjasama dengan IPHRC, IPHRC adalah badan HAM yang di bentuk oleh OKI di ke-38 di Kazakhtan. Advokasi HAM OKI dianggap penting oleh HRWG karena secara strategis OKI dinilai cukup mampu mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara-negara yang di dominasi muslim.

Beberapa tingkatan wilayah kerjasama yang di bangun oleh HRWG demi memajukan perkembangan HAM, tidak luput pula HRWG menyoroti Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN etou yang dikenal denganschutan KTT ASEAN 2011

pada saat moment tersebut Indonesia dipilih sebagai ketua dan menjadi tempat penyelenggara konfrensi tersebut. Hal ini tentu dimanfaatkan HRWG untuk memperluas kemajuan HAM di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, didalam kesempatan tersebut digunakan HRWG untuk memasukkan Isu HAM ASEAN sebagai salah satu pembahasan penting dalam konfrensi tersebut. Dalam kesempatan tersebut HRWG mempunyai strategi untuk mendorong isu HAM ASEAN sebagai salah satu pembahasan penting dalam KTT tersebut.

Melalui media massa, aksi yang ditunjukkan HRWG dan pengembangan jaringan adalah bentuk strategi yang digunakan HRWG dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan apresiasi masyarakat sipil. Media massa selain sebagai alat menyampaikan informasi disisi lain mampu menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat dan hampir seluruh keputusan mempunyai akses ke media massa sehingga media massa dinilai penting dalam hal ini. Media masa yang di gunakan HRWG ada dua macam, yaitu media massa internal dan media massa eksternal. Media massa internal seperti bulletin, laporan hasil rapat atau hasil pemantuan terhadap dialog, pertemuan atau kondisi suatu wilayah hasil dari pengamatan HRWG sendiri, sedangkan media massa eksternal berupa opini, tulisan atau tanggapan suatu keadaan yang ditulis dan disebarluaskan melalui media massa umum, seperti Koran.

Tidak hanya didalam media massa HRWG mempengaruhi pemerintah Indonesia tetapi juga melalui aksi dan previlage yang dimiliki HRWG, aksi yang dilakukan HRWG bersama duapuluh sembilan NGO mengkampanyekan Indonesia

hak-hak beragama juga dilakukan HRWG untuk menyerukan apresiasi mereka. Privilege atau hak istimewa yang dimiliki HRWG dimanfaatkan HRWG untuk bertemu dan berdialog langsung kepada pemangku kepentingan seperti Menteri Luar Negeri untuk memberikan masukan untuk kemajuan HAM. Ketiga cara yang digunakan HRWG tersebut memberikan peluang dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk mengikutseratakan pembahasan isu HAM ASEAN sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan KTT 2011 di Jakarta.